

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, permasalahan terkait lingkungan hidup turut berkembang menjadi salah satu permasalahan global yang terjadi di berbagai negara. Meningkatnya perhatian terhadap aspek lingkungan hidup sebagai salah satu permasalahan global berawal dari dilaksanakannya agenda internasional berupa Konferensi Stockholm yang diadakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 1972. Semenjak diadakan konferensi tersebut pada tahun 1972, topik lingkungan hidup telah menjadi salah satu pembahasan dalam hubungan internasional (Pramudianto, 2011).

Sejak tahun 1972, *United Nations Environment Programme* (UNEP) mulai mengkoordinasikan berbagai negosiasi, perjanjian, kerjasama bilateral, serta kerjasama multilateral dalam aspek lingkungan hidup (O'Neill, 2009). Tidak hanya menghasilkan berbagai bentuk perjanjian dan kerjasama, meningkatnya perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup juga mempengaruhi perkembangan aktor non-negara dalam hubungan internasional, yaitu organisasi non pemerintah. Organisasi non-pemerintah telah berkembang menjadi salah satu aktor yang berpengaruh dan memainkan peranan penting dalam dunia internasional dan memiliki kekuatan untuk

mendorong terjadinya kerjasama internasional melalui mobilisasi aktif dari dukungan publik untuk kesepakatan internasional (Berg, 2009).

Meningkatnya perhatian terhadap permasalahan lingkungan hidup telah menciptakan berbagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup. Dalam dunia internasional, organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan memainkan peranan yang penting dalam menyoroti suatu permasalahan lingkungan global. Organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan juga turut hadir secara aktif dalam berbagai negosiasi internasional atau konferensi global, diantaranya adalah turut aktif dengan melakukan berbagai aksi protes hingga turut aktif dalam melakukan lobi dan negosiasi terhadap suatu negara. Organisasi non-pemerintah telah muncul dan memerankan peran penting dalam berbagai perundingan dan memiliki peran yang tidak dapat diabaikan dalam diplomasi lingkungan hidup walaupun hanya bertindak sebagai pengamat (Pramudianto, 2011).

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan penting yang harus mendapatkan perhatian dan penanganan. Keseluruhan ekologi dari planet bumi tidak terbagi-bagi dalam suatu negara tetapi merupakan satu kesatuan, maka siapa pun yang melakukan suatu tindakan merusak lingkungan dimana pun berarti telah melakukan tindakan merusak lingkungan yang melibatkan seluruh masyarakat internasional (Kennan, 1971). Lingkungan hidup pada dasarnya merupakan aspek penting dalam kelangsungan hidup makhluk hidup yang harus dilindungi. Lingkungan hidup berperan sebagai tempat tinggal sekaligus menyediakan berbagai kebutuhan dasar bagi makhluk

hidup. Oleh karena itu, tindakan perusakan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman terutama dalam jangka panjang.

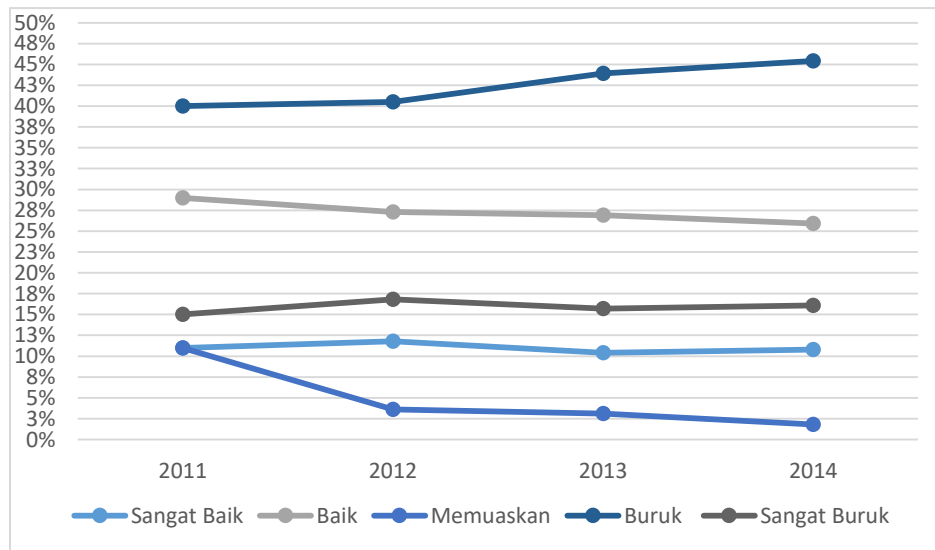
Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang menjadi perhatian adalah polusi atau pencemaran air. Polusi biasanya mengacu kepada bahan kimia atau zat lain yang memiliki jumlah konsentrasi yang besar, polusi juga merupakan sumber dari terjadinya degradasi kualitas air utama di dunia (UNESCO, 2009). Air merupakan salah satu kebutuhan utama manusia untuk melangsungkan kehidupan dan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kualitas air tentunya akan berpengaruh kepada kuantitas air yang dapat digunakan, yakni kualitas air yang buruk mengakibatkan sedikitnya kuantitas air yang dapat digunakan. Terjadinya pencemaran terhadap air akan menurunkan kualitas air sehingga menyebabkan air yang telah terkena polusi tidak dapat dikonsumsi atau digunakan, dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Diketahui bahwa satu dari sembilan orang di dunia tidak memiliki akses terhadap sumber air minum (www.un.org, 2014). Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah pembuangan limbah yang kemudian mencemari perairan (Manjula, 2016). Diketahui bahwa setiap harinya terdapat kurang lebih 2 juta limbah dibuang dan mengalir ke perairan dunia (www.un.org, 2014). Tingginya aktivitas industri memiliki hubungan dengan tingginya pembuangan limbah yang kemudian dapat menyebabkan pencemaran air di suatu negara (World Bank, 2007).

Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi yang cepat (World Bank, 2007). Jika dilihat berdasarkan

asal tempat suatu barang diproduksi, maka dapat dikatakan jika Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara produksi atau pabrik terbesar di dunia (www.chinausfocus.com, 2013). Setiap tahunnya, diketahui pabrik membuang jutaan liter air limbah yang mengandung bahan kimia beracun, yakni banyak bahan kimia tersebut tidak dapat disaring atau dihilangkan sehingga kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan dan penyakit bagi manusia (Tobler, et al., 2017). PBB memasukkan negara Republik Rakyat Tiongkok ke dalam daftar salah satu negara dengan permasalahan krisis air yang serius (Wong, 2013).

Grafik 1.1

Kualitas Air Tanah Republik Rakyat Tiongkok tahun 2011-2014



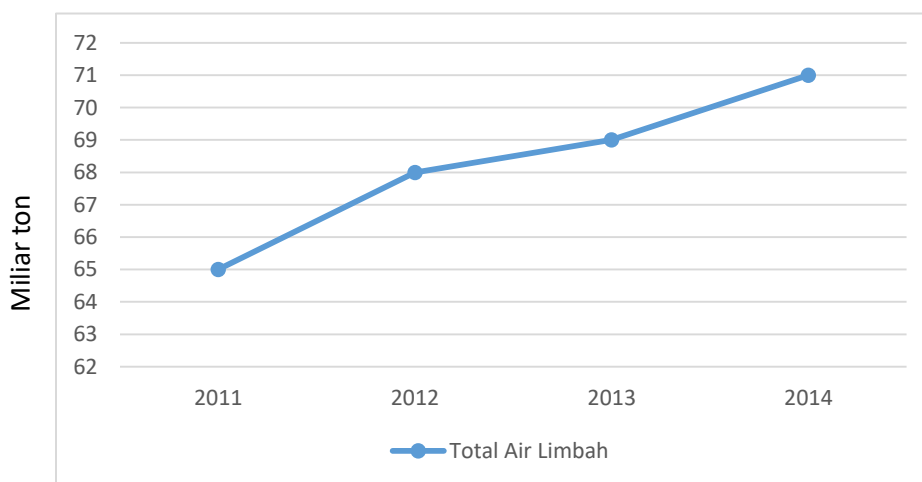
Sumber: *China Water Risk*, 2011-2014

Data pada grafik 2.1, menggambarkan kualitas air tanah di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011 hingga tahun 2014. Dari data tersebut, dapat dilihat

bahwa kualitas air tanah di Republik Rakyat Tiongkok dominan termasuk ke dalam kategori buruk. Jumlah air dengan kualitas buruk mengalami peningkatan dari 40% menjadi 45.4%. Sementara itu, jumlah air dengan kualitas baik, sangat baik, dan memuaskan mengalami penurunan. Diantara tahun 2011-2014, jumlah air dengan kualitas memuaskan mengalami penurunan dari 11% menjadi 1.80%, kualitas baik mengalami penurunan dari 29% menjadi 25.9%, dan kualitas sangat baik mengalami penurunan dari 11% menjadi 10.8%. Pencemaran air yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok dapat disebabkan oleh dua jenis, yakni kecelakaan berupa tumpahnya bahan beracun dan akumulasi dari pembuangan polutan., yakni limbah industri merupakan salah satu penyebab utama dari terjadinya pencemaran air di Republik Rakyat Tiongkok (Lu, Xie, Wen-Shan, Zhang, & Liu, 2008).

Grafik 1.2

Jumlah Air Limbah di Republik Rakyat Tiongkok 2011-2014

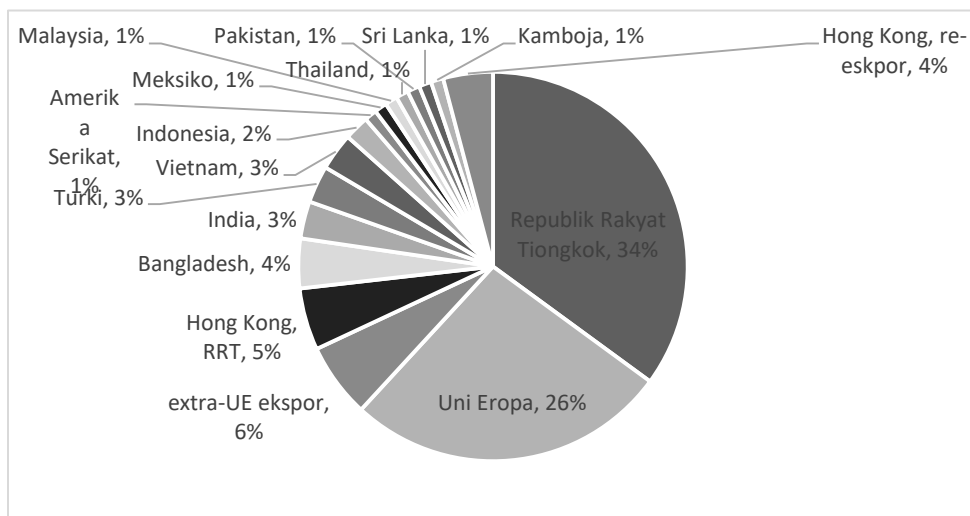


Sumber: *National Bureau of Statistics of China, 2011-2014*

Grafik 2.2 menunjukkan jumlah air limbah pada tahun 2011-2014 di Republik Rakyat Tiongkok. Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah air limbah pertahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan Biro Statistik Nasional Republik Rakyat Tiongkok, industri tekstil merupakan salah satu sektor yang menyumbang limbah terbesar terhadap lingkungan (www.chinawaterrisk.org, 2013). Berdasarkan *World Bank*, diketahui bahwa sekitar 17-20% dari pencemaran air yang disebabkan oleh industri berasal dari industri tekstil (Kant, 2012). Republik Rakyat Tiongkok merupakan salah satu negara tempat produksi tekstil yang menghasilkan dan melakukan aktivitas ekspor pakaian dalam jumlah yang besar. Di Republik Rakyat Tiongkok, industri tekstil juga merupakan salah satu sektor polusi terbesar (Hwang, 2008).

Diagram 1.1

Negara Eksporter Pakaian pada tahun 2011



Sumber: WECF, 2013

Pada diagram 2.1, menunjukkan data dari negara-negara yang menjadi eksporter pakaian pada tahun 2011. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara dengan jumlah ekspor pakaian terbesar jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Tingginya tingkat ekspor kemudian dapat menandakan tingginya tingkat produksi pada industri tekstil. Tingginya tingkat produksi pada industri tekstil kemudian dapat dikatakan memiliki hubungan dengan jumlah air limbah yang meningkat dan kualitas air yang tidak membaik.

Pencemaran air yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok tersebut kemudian turut menjadi perhatian dari salah satu organisasi non-pemerintah internasional yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu Greenpeace. Pada tahun 2011, Greenpeace mengeluarkan publikasi berupa laporan yang berjudul *Dirty Laundry* sebagai hasil dari penelitian terkait pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah beracun di Republik Rakyat Tiongkok. Melalui publikasi *Dirty Laundry*, Greenpeace menyatakan bahwa industri tekstil yang menyebabkan pencemaran air di Republik Rakyat Tiongkok memiliki hubungan dengan beberapa merk pakaian ternama (Greenpeace, 2011). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Greenpeace, beberapa perusahaan pakaian ternama yang melakukan proses produksi di Republik Rakyat Tiongkok telah menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping terhadap lingkungan (Greenpeace, 2011). Publikasi laporan *Dirty Laundry* tersebut menjadi awal dari *Detox Campaign* yang dilaksanakan oleh Greenpeace. Melalui

laporan *Dirty Laundry*, Greenpeace melaksanakan *Detox Campaign* yang memiliki fokus sasaran yakni terhadap pemerintah, perusahaan, dan masyarakat internasional.

Dalam melaksanakan *Detox Campaign* pada tahun 2011-2014, Greenpeace masih belum berhasil dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Tidak berhasilnya Greenpeace dalam memberikan pengaruh terhadap pemerintah melalui *Detox Campaign* ini dilihat dari belum terpenuhinya sistem manajemen bahan kimia yang sesuai dengan rekomendasi Greenpeace dan tidak membaiknya kualitas air pada tahun 2011-2014. Melalui *Detox Campaign*, Greenpeace meminta pemerintah untuk mengadopsi komitmen untuk menghilangkan semua bahan kimia berbahaya yang didasarkan pada prinsip kehati-hatian termasuk pendekatan pencegahan yang menghindari produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya (Greenpeace, 2011). Komitmen ini harus disesuaikan dengan seperangkat kebijakan dan peraturan manajemen bahan kimia yang menetapkan: 1. Target jangka pendek atau menengah yang melarang produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya, 2. Daftar dinamis bahan berbahaya yang memerlukan tindakan segera, sehingga bahan kimia berbahaya diganti secara progresif dengan alternatif yang lebih aman, 3. Daftar mengenai pelepasan, emisi, dan kerugian zat berbahaya yang dapat diakses oleh umum, seperti *Pollutant Release and Transfer Register*¹ (www.greenpeace.org).

¹ *Pollutant Release and Transfer Register* (PRTP) merupakan database yang dapat diakses oleh publik atau inventaris bahan kimia atau polutan yang dilepaskan ke udara, air, dan tanah dan dipindahkan ke wilayah penanganan. *Pollutant Release and Transfer Register* menyatukan informasi mengenai bahan kimia yang dilepaskan, seberapa banyak, dan oleh siapa. Diakses dari www.oecd.org.

Pertama, pengaruh *Detox Campaign* terhadap kebijakan maupun peraturan berupa penetapan target jangka pendek menengah yang melarang produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Republik Rakyat Tiongkok memiliki program pembangunan nasional, yaitu pembangunan ekonomi dan sosial yang dinamakan dengan rencana lima tahun. Selama *Detox Campaign* dilaksanakan pada tahun 2011-2014, terdapat rencana lima tahun yaitu *The 12th Five Year Plan* (2011-2015). Dalam rencana lima tahun tersebut, masih belum terdapat pelarangan terhadap produksi dan penggunaan bahan kimia berbahaya. Dalam hal lingkungan, *The 12th Five Year Plan* lebih memiliki fokus terhadap persoalan pemanasan global, energi, dan pengurangan emisi (APCO Worldwide, 2010, Zhang, Q dan Crooks, R, 2011, KPMG China, 2011).

Kedua, pengaruh *Detox Campaign* terhadap kebijakan maupun peraturan berupa penetapan daftar bahan berbahaya yang memerlukan tindakan segera, yakni tindakan untuk menghentikan penggunaan bahan-bahan kimia tersebut. Republik Rakyat Tiongkok telah memiliki *Catalogue of Hazardous Chemicals* (2002) dan mengeluarkan *Priority Hazardous Chemicals for Environmental Management* (2014) yang masih bersifat percobaan (*trial*). Dari kedua daftar tersebut, sebagian besar bahan-bahan kimia berbahaya yang disebutkan dalam laporan penelitian Greenpeace belum termasuk ke dalam daftar tersebut. **Tujuan utama dari adanya keinginan untuk dibentuknya daftar bahan berbahaya adalah agar bahan berbahaya tersebut dapat dihentikan penggunaannya (Greenpeace, 2011).** Berdasarkan laporan penelitian Greenpeace, hingga tahun 2014 masih ditemukan beberapa produk pakaian

yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya termasuk bahan kimia yang telah termasuk ke dalam daftar tersebut. Hal ini kemudian menandakan bahwa penggunaan bahan-bahan kimia tersebut belum dihentikan penggunaannya, dengan demikian keinginan Greenpeace untuk dibentuknya suatu daftar bahan kimia yang memerlukan tindakan segera dan yang harus diberhentikan penggunaannya belum sepenuhnya terpenuhi.

Ketiga, pengaruh *Detox Campaign* terhadap kebijakan maupun peraturan berupa penetapan daftar mengenai pelepasan, emisi, dan kerugian zat berbahaya yang dapat diakses oleh umum, seperti *Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)*. PRTR merupakan *database* yang seharusnya dapat diakses oleh publik atau inventaris bahan kimia atau polutan yang dilepaskan ke udara, air, dan tanah (www.oecd.org). Namun, hingga saat ini masih belum terdapat daftar mengenai pelepasan, emisi, dan kerugian zat berbahaya yang dapat diakses oleh umum.

Selain dilihat dari peraturan maupun kebijakan yang ada, pengaruh dari *Detox Campaign* dapat dilihat dari perubahan pada kualitas lingkungan yakni kualitas air yang ada. Kualitas air di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011-2014 masih memiliki tingkat air dengan kualitas buruk. Untuk perubahan pada peningkatan kualitas air dapat dikatakan masih belum terlihat. Pengaruh dari suatu organisasi non-pemerintah juga dapat dilihat dalam keikutsertaannya dalam suatu diskusi, forum, maupun pembuatan keputusan walaupun hanya berperan sebagai pengamat (Pramudianto, 2011). Selama pelaksanaan *Detox Campaign*, Greenpeace sebagai

organisasi non-pemerintah dalam suatu forum, diskusi, maupun pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk suatu diskusi, forum, maupun ikut serta dalam suatu pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah masih belum memainkan peranan dalam hal tersebut.

Dari ketiga hal tersebut, secara keseluruhan dapat dikatakan kebijakan maupun peraturan yang sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Greenpeace masih belum sepenuhnya terpenuhi. Selain itu dalam hal kualitas air masih belum mengalami perbaikan. Selanjutnya, dengan begitu dapat dikatakan *Detox Campaign* yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2011-2014 di Republik Rakyat Tiongkok belum sepenuhnya memberikan pengaruh terhadap pemerintah.

Terkait dengan penelitian ini, telah terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah mengidentifikasi permasalahan lingkungan hidup berupa pencemaran air yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok dan Greenpeace sebagai organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam lingkungan hidup dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Berdasarkan penelitian sebelumnya (“Keterlibatan Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan: Studi Kasus Pencemaran Air di China”; Rozikin, 2013), Greenpeace telah cukup banyak memberikan kontribusi dan peran dalam penyelamatan lingkungan hidup di Republik Rakyat Tiongkok, termasuk dengan melaksanakan *Detox Campaign*. Dalam menanggulangi pencemaran air di Republik Rakyat Tiongkok, Greenpeace melakukan serangkaian kegiatan, yaitu: 1. Advokasi, 2. Monitoring, penelitian, dan evaluasi, 3. Fasilitas komunikasi. Penelitian sebelumnya

(“Gerakan Transnasional dan Kebijakan: Strategi Advokasi Greenpeace *Detox Campaign* on Fashion di Tiongkok”; Parameswari, 2016) juga telah menjelaskan bahwa dalam melaksanakan *Detox Campaign* di Republik Rakyat Tiongkok, Greenpeace menggunakan strategi advokasi berupa kampanye media untuk meningkatkan perhatian terhadap isu tersebut dengan melibatkan dunia internasional dan melakukan *framing issue* pencemaran air. Dalam periode tahun 2011-2013, *Detox Campaign* oleh Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok dinyatakan berhasil terhadap masyarakat internasional dan perusahaan multinasional. Berdasarkan penelitian ini, pada periode 2011-2013 kampanye *Detox Campaign* telah berhasil terhadap dua target yaitu perusahaan multinasional dan masyarakat internasional, dan masih belum memberikan pengaruh pada pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan gambaran pada latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Mengapa upaya *Detox Campaign* oleh Greenpeace pada tahun 2011-2014 dalam menanggulangi pencemaran lingkungan belum memberikan pengaruh terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai mengetahui penyebab *Detox Campaign* oleh Greenpeace dalam menanggulangi pencemaran lingkungan yang belum memberikan pengaruh terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terutama untuk ilmu hubungan internasional dalam topik lingkungan hidup dan organisasi non-pemerintah. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terkait dengan upaya organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara dalam hubungan internasional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih penelitian terkait pengaruh organisasi non-pemerintah dalam suatu negara, serta tantangan yang dihadapi oleh organisasi non-pemerintah tersebut. Dalam hal ini sebagai studi kasus adalah

Detox Campaign yang dilaksanakan oleh Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi terkait penyebab *Detox Campaign* oleh Greenpeace dalam menanggulangi pencemaran lingkungan belum memberikan pengaruh terhadap Republik Rakyat Tiongkok. Sehingga nantinya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat untuk lebih memahami aktor non-negara dalam hubungan internasional, khususnya organisasi non-pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian yang akan datang terkait dengan tema ini.

1.5 Kerangka Pemikiran

Global Civil Society merupakan salah satu konsep yang telah berkembang dalam dunia internasional. *Global civil society* merupakan istilah yang merujuk kepada kelompok advokasi yang mandiri yang melakukan tindakan kolektif secara sukarela di seluruh perbatasan negara dengan tujuan untuk mengejar apa yang mereka anggap merupakan kepentingan publik yang lebih luas (Price, 2003). *Civil society* terdiri dari aktor yang terpisah dan bukan merupakan bagian dari negara, pemerintah, maupun perusahaan (Price, 2003) . *Civil Society* pada umumnya merujuk kepada agen “*third*

system”, yaitu anggota masyarakat yang terorganisir secara pribadi dan dibedakan dari negara maupun aktor yang mencari keuntungan (Price, 2003). Definisi PBB terhadap *Civil Society Organizations* yaitu aktor yang tidak memiliki orientasi terhadap keuntungan secara langsung dan tidak mencari jabatan politik (Bernauer & Gampfer, 2013). *Global civil society* juga didefinisikan oleh World Bank sebagai kegiatan untuk meringankan penderitaan, mempromosikan kepentingan orang miskin, melindungi lingkungan, memberikan layanan sosial dasar, atau melakukan pengembangan masyarakat (Lehman, 2007).

Global civil society dapat dilihat dalam dua hal, yakni keanggotaan dan taktik/strategi (Scholte, 1999). Dalam hal keanggotaan, *global civil society* terdiri dari berbagai macam aktor yang beragam. Aktor *global civil society* terdiri dari lembaga akademis, asosiasi bisnis, organisasi berbasis masyarakat, badan perlindungan konsumen, kelompok kerjasama pembangunan, kampanye lingkungan, lobi etnis, yayasan, kelompok tani, advokat hak asasi manusia, serikat pekerja, organisasi bantuan, aktivis perdamaian, badan profesional, lembaga keagamaan, jaringan perempuan, kampanye pemuda, dan banyak lagi (Scholte, 1999). Selanjutnya, dalam hal strategi yang digunakan dalam melaksanakan aktivitasnya demi mencapai tujuan yang diinginkan, taktik/strategi aktor *global civil society* yaitu: 1. Mengangkat isu transnasional, 2. Melibatkan komunikasi lintas batas, 3. Memiliki organisasi global (Scholte, 1999). Aktivitas-aktivitas tersebut dilaksanakan oleh aktor *global civil society* demi mencapai tujuan yang dianggap sebagai kepentingan publik yang lebih luas

(Scholte, 1999). Hal-hal yang menjadi tujuan dari aktor *global civil society*, yakni: untuk mengangkat suatu isu ke dalam agenda internasional, untuk membuat aktor internasional mengubah posisi dan prosedur institusional suatu aktor, dan untuk mempengaruhi perubahan kebijakan dan perilaku aktor (Price, 2003). Tujuan dari *global civil society* dapat dikatakan memiliki tujuan utama untuk menciptakan perubahan pada aktor, termasuk kebijakan dan perilaku, demi kepentingan publik dengan cara mempengaruhi suatu aktor melalui pengangkatan suatu isu (Price, 2003). Menurut Johnson, dalam Florini 1999, *global civil society* hadir tidak untuk menggantikan negara, namun untuk memberikan informasi dan meyakinkan pemerintah dan bisnis untuk mengadopsi atau meninggalkan suatu kebijakan atau posisi tertentu (Price, 2003).

Dalam dunia internasional, aktor yang termasuk dalam *global civil society* hadir dan berperan sebagai aktor yang mengidentifikasi dan menerapkan isu-isu publik yang diabaikan oleh pemerintah dan perusahaan (Price, 2003). Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh aktor *global civil society* terdiri dari: 1. *Agenda setting* – mengidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian internasional dan menghasilkan informasi, 2. *Developing solutions* – menciptakan norma atau merekomendasikan perubahan kebijakan, 3. *Building networks and coalition of allies* – membangun jaringan dan koalisi dengan sekutu, 4. *Implementing solutions* – menggunakan taktik persuasi dan tekanan untuk mengubah praktik dan/atau keberanian berupa kepatuhan terhadap norma (Price, 2003).

Berdasarkan definisi dari *global civil society*, aktivitas, dan aktor yang termasuk di dalamnya, Greenpeace merupakan organisasi non-pemerintah internasional yang termasuk di dalam *global civil society*. Greenpeace merupakan aktor yang tidak tergabung dalam pemerintah dan perusahaan, maupun bukan merupakan aktor yang mencari keuntungan. Kampanye lingkungan juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Greenpeace. Selain itu, aktivitas yang dilakukan oleh aktor *global civil society* termasuk ke dalam aktivitas yang dilakukan oleh Greenpeace dalam melaksanakan suatu kampanye lingkungan.

Menurut Keck dan Sikkink 1998 dan Tallberg, et al 2014, aktor *global civil society* hadir sebagai pengamat dan peserta dalam berbagai proses pembuatan kebijakan lingkungan nasional dan internasional, misalnya yang berkaitan dengan perlindungan spesies, keanekaragaman hayati, polusi udara dan air, dan perubahan iklim (Bernauer, Gampfer, Meng, & Su, 2016). Kehadiran dari *global civil society* diharapkan dapat membantu mengatasi kesenjangan legitimasi, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, memberikan pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas pemecahan masalah di institusi pemerintahan dan lainnya (Bernauer dan Gampfer 2013, Bernauer, Gampfer dan Meng, et al. 2016). Kesuksesan dari aktivitas *global civil society* membutuhkan elit dan pengambil keputusan utama yang peduli dengan reputasi internasional (Price, 2003). *Global civil society* juga merupakan pilihan yang dapat digunakan dan dapat menjadi sumber pendukung bagi

masyarakat yang berada di bawah rezim otoriter, yakni masyarakat sipil setempat yang mengalami penekanan (Wild, 2006).

Dalam melaksanakan gerakan *global civil society*, para aktor tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat ditemui (Brown & Kalegaonkar, 1999). Tantangan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan *global civil society* dapat berbeda-beda dalam setiap negara yang memiliki kondisi politik dan ekonomi, sejarah institusi, dan kontak internasional yang berbeda-beda (Brown & Kalegaonkar, 1999). Tantangan yang dihadapi oleh aktor *global civil society* dapat berupa tantangan eksternal yang berasal dari luar aktor (Brown & Kalegaonkar, 1999). Tantangan eksternal merupakan tantangan yang terjadi dalam hubungan antar sektor (Brown & Kalegaonkar, 1999). Berdasarkan Salamon dan Anheier, ruang politik dan regulasi pemerintah merupakan tantangan eksternal yang muncul dalam *global civil society* (Brown & Kalegaonkar, 1999). Hubungan antara aktor *global civil society* dan negara dapat menimbulkan tantangan, yakni banyak negara dimana para aktor pemerintah memiliki kecurigaan terhadap aktor *global civil society*, terutama dalam negara yang sangat terpusat dan menilai semua aktivitas pembangunan sebagai tanggung jawab negara, bukan aktor lain (Brown & Kalegaonkar, 1999). Dalam hal regulasi pemerintah, pemerintah dalam suatu negara dapat mengadopsi sebuah kebijakan untuk mencegah pembentukan aktor *civil society* tidak tumbuh terlalu besar yang dapat menantang dan melemahkan kontrol negara terhadap masyarakat, atau untuk membatasi otonomi dalam merumuskan kebijakan (Lu, 2005). Dalam menangani ruang politik dan regulasi pemerintah, aktor

global civil society melakukan berbagai strategi (Brown & Kalegaonkar, 1999).. Salah satu strategi yang dilakukan oleh aktor *global civil society* adalah melaksanakan kegiatan yang *low-profile* atau tidak terlalu memberikan perhatian besar terhadap pemerintah (Brown & Kalegaonkar, 1999).

Dalam penelitian ini, akan menggunakan *global civil society* untuk menggambarkan Greenpeace sebagai salah satu aktor non-negara atau organisasi non-pemerintah yang berupaya untuk mengangkat suatu isu lingkungan melalui kampanye di Republik Rakyat Tiongkok. Selanjutnya, penulis akan menganalisa penyebab kurang berpengaruhnya kampanye *Detox Campaign* di Republik Rakyat Tiongkok dengan menunjukkan tantangan-tantangan, yang menjadi hambatan dalam dilaksanakannya kampanye, yang dihadapi oleh Greenpeace sebagai aktor dalam *global civil society*.

1.6 Hipotesis

Melihat latar belakang dan kerangka pemikiran yang digunakan, penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa penyebab mengapa *Detox Campaign* tidak berhasil memberikan pengaruh terhadap pemerintah adalah dikarenakan negara Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang tertutup. Dalam hal ini, Republik Rakyat Tiongkok merupakan negara yang tidak terbuka dan tidak demokratis termasuk dalam pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dapat dikatakan tidak menerima bentuk campur tangan dari pihak luar, termasuk

organisasi non-pemerintah seperti Greenpeace. Dengan demikian, aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah, termasuk Greenpeace, tidak berhasil memberikan pengaruh terhadap pemerintah.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Pencemaran Lingkungan

Berdasarkan *Environmental Protection Agency*, pencemaran merupakan setiap zat dalam air, tanah, atau udara yang menurunkan kualitas alami lingkungan, menyinggung indra penglihatan, rasa, atau bau, atau menyebabkan bahaya kesehatan (www.ofmpub.epa.gov). Pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu: air, udara, dan lahan (National Geographic Society, 1988). Pencemaran air termasuk ke dalam salah satu jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran air terjadi ketika zat beracun masuk ke badan air seperti danau, sungai, samudera, dan sebagainya, larut dalam air, terdapat dalam air, dan dapat menurunkan kualitas air (www.wwf.org). Berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, pencemaran terhadap lingkungan laut berarti masuknya zat atau energi ke dalam lingkungan laut, termasuk muara, secara langsung atau tidak langsung oleh manusia yang dapat mengakibatkan efek merugikan

seperti: 1. bahaya terhadap sumber daya hayati dan kehidupan laut., 2. bahaya terhadap kesehatan manusia., 3. halangan terhadap aktifitas kelautan, termasuk penangkapan ikan dan penggunaan laut lainnya, penurunan kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas (www.un.org). Pencemaran air dapat terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, seperti limbah industri, aktifitas pertanian, dan aktifitas manusia (Owa, 2014).

1.7.1.2 Kampanye

Kampanye merupakan aktivitas komunikasi publik yang mencakup adanya upaya untuk memberitahukan, meyakinkan, dan mendorong adanya perubahan perilaku yang ditujukan kepada khalayak atau masyarakat luas (Atkin & Rice, Public Communication Campaigns, 2012). Dalam pelaksanaan suatu kampanye, dilakukan adanya pemilihan strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi suatu wawasan, sikap, dan perilaku dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik, lingkungan, dan kesehatan (Atkin & Rice, Advances in Public Communication Campaigns, 2013).

1.7.1.2 Organisasi Non-Pemerintah

Berdasarkan Persatuan Bangsa-Bangsa, organisasi non-pemerintah dapat didefinisikan sebagai setiap organisasi internasional yang tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan antar pemerintah dapat dikategorikan

sebagai organisasi non-pemerintah (Ahmed & Potter, 2006). Selain itu, organisasi non-pemerintah juga dapat didefinisikan sebagai organisasi swasta yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk meringankan penderitaan, memajukan kepentingan kaum tidak mampu, melindungi lingkungan, menyediakan layanan sosial atau melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat (Malena, 1995).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Pencemaran Lingkungan

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai salah satu jenis pencemaran lingkungan, yakni pencemaran air yang disebabkan oleh limbah industri. Limbah industri yang mengandung bahan kimia beracun merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran air di Republik Rakyat Tiongkok. Penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses produksi pakaian telah menyebabkan terjadinya pencemaran air. Pencemaran air yang disebabkan oleh limbah beracun memberikan dampak termasuk mengancam kesehatan manusia.

1.7.2.2 Kampanye

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai *Detox Campaign* yang dilaksanakan oleh Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok yang

memiliki sasaran kampanye yaitu kepada Republik Rakyat Tiongkok, perusahaan multinasional, dan masyarakat internasional. *Detox Campaign* merupakan salah satu kampanye yang dilaksanakan oleh Greenpeace mulai tahun 2011, dengan tujuan untuk mengungkap adanya hubungan antara merk pakaian global ternama, pemasok dari merk pakaian global tersebut, dan pencemaran air dari limbah beracun di dunia.

1.7.2.3 Organisasi Non-Pemerintah

Dalam penelitian ini, akan membahas mengenai salah satu organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang lingkungan hidup, yaitu Greenpeace, dalam melaksanakan kampanye *Detox Campaign* di Republik Rakyat Tiongkok.

1.7.3 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatif. Dengan metode penelitian ini, penelitian ini dapat menggambarkan dan menjelaskan penyebab *Detox Campaign* oleh Greenpeace dalam menanggulangi pencemaran lingkungan belum memberikan pengaruh terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai *Detox Campaign* yang dilakukan oleh Greenpeace pada tahun 2011-2014. Penelitian ini akan terbatas penyebab *Detox Campaign* oleh Greenpeace dalam menanggulangi pencemaran lingkungan belum memberikan pengaruh terhadap Republik Rakyat Tiongkok.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Studi Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode studi pustaka yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara melakukan pengumpulan data dan informasi melalui sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, artikel, laporan.

b. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode dokumentasi yaitu berupa penggunaan dokumen berupa foto, video, tabel dari sumber kredibel.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode wawancara yaitu berupa melakukan tanya jawab baik secara langsung maupun melalui email kepada responden yang berkaitan dengan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan dalam penelitian yang dilakukan setelah peneliti berhasil mengumpulkan data-data terkait. Analisis data adalah proses proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 1989) Teknik analisis data versi Miles dan Huberman (Usman & Akbar, 2008), adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga data yang terkumpul dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif, yang dilakukan untuk mendapatkan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan.

1.7.7 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian, salah satu tahap yang harus dilakukan adalah menuliskan penelitian yang dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I

Dalam BAB I, menguraikan mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam latar belakang tersebut penulis akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pentingnya permasalahan yang diangkat dan mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti. Selanjutnya, penulis akan menguraikan rumusan masalah yang akan diteliti dan dijawab dari penelitian. Selanjutnya, penulis juga akan menguraikan tujuan dan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian. Penulis juga akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang akan digunakan sebagai dasar penelitian dalam penelitian. Selanjutnya, dalam BAB I ini juga dijelaskan mengenai definisi konseptual dan operasional yang memberikan definisi atau penjelasan, tipe penelitian yang digunakan, jangkauan dari penelitian, teknik pengumpulan yang digunakan, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

Dalam BAB II, menguraikan profil dan sejarah dari Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok.

BAB III

Dalam BAB III, menguraikan mengenai pelaksanaan *Detox Campaign* oleh Greenpeace di Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 2011-2014.

BAB IV

Dalam BAB IV, menjelaskan analisis penyebab *Detox Campaign* oleh Greenpeace belum memberikan pengaruh terhadap pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

BAB V

Dalam BAB V, menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan.